BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan penulis pada pembahasan penelitian yang menggunakan teori prof. K V Thai yang menjadikan 8 indikator *e-procurement* sebagai alat untuk mengukur kinerja pengadaan alat kesehatan secara elektronik di Provinsi Jawa Timur maka penulis menyimpulkan:

1. Pengadaan alat kesehatan melalui *e-procurement* di Provinsi Jawa Timur berjalan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya 62 paket pengadaan alat kesehatan tanpa ada satu kasus kecurangan pun dari BPK selama tahun 2015. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala teknis yang sering dihadapi di antaranya Perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan alat kesehatan bahkan tidak memiliki website sehingga proses transparansi hanya dilakukan perusahaan ke pemerintah tidak ke masyarakat. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya peraturan dari pemerintah untuk mewajibkan tiap perusahaan yang mengikuti tender memiliki website. Kendala lainnya yang sering terjadi adalah ketersediaan Jaringan internet dari Telkom dan arus listrik yang terkadang padam dari PLN. Selain itu, alat kesehatan belum diproduksi di dalam negeri sehingga perusahaan harus mengimpornya dari luar negeri.

- 2. Para Stakeholders yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa diwajibkan memahami pentinya IT secara maksimal. Pihak-pihak yang terlibat di antaranya adalah LPSE, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, PPK, KPA, pihak Rumah Sakit, dan ULP. Setiap kelompok kepentingan mengerjakan tugasnya masing-masing, pada ranah yang telah ditentukan. Namun dalam hal penyusunan dokumen, sebagian dari mereka berpendapat bahwa perlu adanya penganggaran yang khusus untuk penyusunan dokumen. Mengingat pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang mudah.
- 3. Secara umum, proses demokrasi dalam pengadaan alat kesehatan di Jawa Timur belum terlaksana secara maksimal. Kemenangan 95% perusahaan lokal membuktikan masih kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perusahaan luar Jawa Timur. Padahal terdapat beberapa perusahaan luar Jawa Timur yang mendaftar mengikuti Tender.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat meningkatkan kualitas *e-procurement* pada pengadaan alat kesehatan di Jawa Timur.

 Mengingat jumlah paket e-procurement di Jawa Timur dalam kategori banyak, seharusnya LPSE dan ULP menjadi lembaga independent yang terintegrasi dan berdiri sendiri.

- Mengingat produksi alat kesehatan masih didatangkan dari luar negeri, maka seharusnya pemerintah dalam hal ini Departement Kesehatan meningkatkan produk alat kesehatan dalam negeri.
- 3. Demi menekan mahalnya harga alat kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan, maka seharusnya kontrol dan kualitas kinerja panitaia pengadaan barang dan jasa secara elektronik ditingkatkan.
- 4. Mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang belum mampu meneliti secara sempurna tentang evaluasi *e-procurement* pada pengadaan alat kesehatan di Jawa Timur maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai pengaruh *e-procurement* terhadap tingkat kompetitif perusahaan yang mengikuti tender pengadaan alat kesehatan.